

Economic Resilience of Rural Families of the Deaf: Strategies for Coping with Social Exclusion and Accessibility

KOLOKIUUM

Jurnal Pendidikan Luar Sekolah

<http://kolokium.ppj.unp.ac.id/>

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah

Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Negeri Padang

Sumatera Barat, Indonesia

Volume 13, Nomor 2, Tahun 2025

DOI: 10.24036/kolokium.v13i2.1188

Received 12 September 2025

Approved 31 Oktober 2025

Published 01 November 2025

Tri Ulya Qodriyati^{1,7}, Savira Widya Puspitasari², Monica Widyaswari³, Ica Purnamasari⁴, Tisya Fajriatus Salim⁵, Zahwa Islami⁶

^{1,3,5,6} Universitas Negeri Surabaya

² Universitas Negeri Makassar

⁴ Universitas Negeri Malang

⁷ triqodriyati@unesa.ac.id

ABSTRACT

This study aims to identify the economic resilience strategies of visually impaired families in rural Grobogan Regency, Indonesia, who face the challenges of social exclusion and limited accessibility. The method used is a qualitative approach of a case study with a purposive sample consisting of 10 visually impaired families who are actively involved in daily economic activities. Data was collected through in-depth interviews, participatory observations, and documentation. The results of the study show that social stigma against people with disabilities is the main obstacle to their participation in economic and social activities. Discrimination in employment opportunities and limited access to education and public services also exacerbate their economic resilience. Nonetheless, rural blind families show resilience through adaptation strategies, such as working in the informal sector, opening home businesses, and leveraging social support from extended families and communities. This research provides new insights into the importance of creating an inclusive social environment and policies that support accessibility for people with disabilities, in order to improve their economic resilience. These findings can also serve as a reference for the government and the community in designing more inclusive empowerment policies.

Keywords: Economic Resilience, Homeless Families, Social Exclusion, Accessibility, Discrimination, Informal Sector.

PENDAHULUAN

Ketahanan keluarga menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan kesejahteraan rumah tangga, terutama bagi kelompok yang menghadapi kerentanan sosial dan ekonomi (Çetinkaya Duman & Sari, 2021). Di wilayah pedesaan, keluarga biasanya bertumpu pada jaringan sosial, solidaritas komunitas, dan pemanfaatan sumber daya lokal untuk tetap bertahan. Penelitian terdahulu oleh Reyes (2024) menegaskan bahwa akses terhadap

pendidikan, kesempatan kerja, dan layanan publik sangat menentukan kemampuan keluarga dalam menghadapi tantangan. Selain itu, lingkungan sosial yang inklusif diyakini mampu memperkuat peran serta keluarga dalam aktivitas ekonomi maupun sosial (Li et al., 2024). Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa ketahanan keluarga tidak hanya ditopang oleh faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan eksternal yang tersedia di masyarakat.

Difabel tunawicara merujuk pada individu yang memiliki keterbatasan dalam berbicara atau berkomunikasi secara verbal, namun tidak mengganggu fungsi kognitif atau intelektual mereka (S et al., 2023). Keterbatasan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk gangguan pada sistem saraf, kecelakaan, atau kelainan pada saluran komunikasi tubuh. Meskipun tidak dapat berbicara dengan cara yang umum, banyak difabel tunawicara yang mampu berkomunikasi melalui cara alternatif seperti menggunakan bahasa isyarat, tulisan, atau alat bantu komunikasi lainnya. Dalam konteks penelitian ini, keluarga tunawicara mengacu pada keluarga yang memiliki anggota dengan keterbatasan dalam berbicara, yang berdampak pada interaksi sosial dan akses mereka terhadap peluang ekonomi dan sosial.

Eksklusi sosial masih menjadi persoalan utama yang dihadapi keluarga tunawicara, khususnya di wilayah pedesaan (Hay-McCutcheon et al., 2021). Mereka kerap mengalami stigma dan diskriminasi, baik dalam interaksi sosial maupun ketika mengakses layanan publik. Kondisi ini menimbulkan marginalisasi yang membatasi partisipasi keluarga tunawicara dalam kegiatan ekonomi maupun sosial. Sayangnya, isu eksklusi sosial terhadap difabel tunawicara di pedesaan belum banyak terangkat dalam penelitian sebelumnya. Padahal, pemahaman mengenai bentuk dan dampaknya sangat penting untuk merumuskan strategi intervensi yang tepat.

Selain persoalan eksklusi sosial, keterbatasan aksesibilitas juga menjadi hambatan serius bagi keluarga tunawicara di pedesaan (Andrunyk et al., 2021). Mereka sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh pendidikan yang layak, kesempatan kerja yang sesuai, serta layanan publik yang ramah difabel. Kim et al. (2024) menyebutkan bahwa minimnya pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi turut memperlebar kesenjangan dengan masyarakat lain. Meskipun aksesibilitas telah banyak dibahas dalam konteks difabel secara umum, kajian yang secara khusus menyoroti pengalaman keluarga tunawicara di wilayah pedesaan masih jarang ditemukan. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk menelaah lebih dalam bagaimana keterbatasan akses tersebut memengaruhi ketahanan ekonomi keluarga tunawicara.

Mengisi kesenjangan penelitian ini penting karena eksklusi sosial dan keterbatasan aksesibilitas terbukti memperbesar kerentanan ekonomi keluarga tunawicara di pedesaan. Dengan menelaah secara mendalam bagaimana stigma, diskriminasi, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik memengaruhi kehidupan mereka, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman baru tentang dinamika ketahanan ekonomi difabel. Tujuan utama penelitian ini adalah mengidentifikasi strategi bertahan keluarga tunawicara dalam menghadapi eksklusi sosial dan hambatan aksesibilitas di Kabupaten Grobogan. Penelitian ini berfokus untuk menelaah secara mendalam dinamika eksklusi sosial dan keterbatasan aksesibilitas yang dihadapi keluarga tunawicara di pedesaan. Kajian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi strategi mereka dalam mempertahankan ketahanan ekonomi di tengah berbagai keterbatasan sosial dan struktural.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai ketahanan keluarga difabel, khususnya tunawicara, yang masih jarang diangkat dalam konteks pedesaan. Secara praktis, temuan penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan masyarakat desa dalam merancang kebijakan maupun program pemberdayaan yang lebih inklusif. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat perspektif bahwa ketahanan ekonomi keluarga tunawicara tidak hanya ditentukan oleh faktor internal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan aksesibilitas yang tersedia di lingkungannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi ketahanan ekonomi keluarga tunawicara di pedesaan Kabupaten Grobogan. Pendekatan ini dipilih karena menekankan bahwa penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menangkap makna subjektif dan pengalaman hidup informan dalam konteks sosial dan ekonomi yang lebih luas. Pendekatan studi kasus juga memungkinkan peneliti untuk menyelidiki fenomena secara terperinci dalam konteksnya, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi keluarga tunawicara di daerah pedesaan.

Populasi penelitian terdiri dari keluarga tunawicara di wilayah Kabupaten Grobogan, dengan sampel purposif sebanyak 10 keluarga yang dipilih berdasarkan keterlibatan aktif mereka dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Jumlah 10 keluarga dipilih untuk memastikan keterlibatan yang cukup dalam pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman secara rinci namun tetap terfokus pada fenomena yang relevan. Pemilihan sampel purposif ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai strategi bertahan ekonomi yang diterapkan oleh keluarga tunawicara yang aktif dalam kegiatan ekonomi lokal. Sampel ini memungkinkan peneliti untuk menggali beragam perspektif dalam konteks yang spesifik, namun tetap terfokus pada pengalaman yang relevan. Instrumen penelitian yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, yang memberikan data yang lebih kaya dan kontekstual. Sebagai instrumen utama, wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi kualitatif yang lebih mendalam mengenai pengalaman keluarga tunawicara, sementara observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk memahami langsung dinamika kehidupan sehari-hari mereka. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data, seperti catatan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh keluarga tunawicara. Sebagaimana dijelaskan oleh Huitema et al. (2024), ketiga instrumen ini saling melengkapi untuk memberikan data yang lebih valid dan komprehensif.

Prosedur penelitian dilakukan melalui tahap persiapan, pengumpulan data lapangan, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana model analisis interaktif yang dikemukakan oleh (Miles & Huberman, 1994). Dalam proses ini, reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan untuk fokus penelitian, sedangkan penyajian data akan dilakukan dalam bentuk tema-tema yang muncul dari hasil wawancara dan observasi. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan yang mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola-pola strategi bertahan yang diterapkan oleh keluarga tunawicara. Analisis tematik digunakan untuk menemukan pola-pola strategi bertahan yang dihadapi keluarga tunawicara dalam mengatasi eksklusi sosial dan keterbatasan aksesibilitas. Dengan

menganalisis tema-tema yang muncul, peneliti dapat menggali bagaimana keluarga tunawicara menghadapi tantangan sosial dan ekonomi serta mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mendukung ketahanan ekonomi mereka.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa stigma masyarakat terhadap keluarga tunawicara di pedesaan sangat kuat. Sebagian besar keluarga mengungkapkan bahwa anggota keluarga tunawicara sering kali dipandang sebelah mata, bahkan dianggap tidak mampu memberikan kontribusi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Stigma ini menciptakan penghalang sosial yang mengisolasi keluarga tunawicara dari kegiatan yang lebih luas, baik dalam interaksi sosial sehari-hari maupun dalam partisipasi ekonomi. Sebagai contoh, dalam kegiatan gotong-royong atau acara komunitas, mereka sering kali tidak dilibatkan karena dianggap tidak mampu berkomunikasi secara verbal. Hal ini menyebabkan adanya marginalisasi sosial yang memperlebar jarak antara mereka dan masyarakat sekitar. Diskriminasi dalam kesempatan kerja juga menjadi masalah utama. Banyak anggota keluarga tunawicara yang melaporkan kesulitan dalam memperoleh pekerjaan di sektor formal. Ketika mereka mencoba melamar pekerjaan, sering kali mereka diabaikan atau ditolak dengan alasan keterbatasan dalam berkomunikasi atau stigma tentang kemampuan mereka. Akibatnya, sebagian besar mereka terpaksa bergantung pada pekerjaan di sektor informal dengan penghasilan yang tidak tetap. Hasil ini konsisten dengan temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa akses terhadap pekerjaan formal bagi difabel tunawicara sangat terbatas (Jacob et al., 2023).

Akses terhadap pendidikan dasar dan keterampilan merupakan tantangan besar bagi keluarga tunawicara di pedesaan. Anak-anak dari keluarga tunawicara kerap kali kesulitan dalam mengikuti pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Beberapa orangtua melaporkan bahwa fasilitas pendidikan di sekolah-sekolah lokal belum cukup ramah bagi anak difabel, seperti kurangnya tenaga pendidik yang terlatih dalam menangani kebutuhan khusus dan minimnya materi pendidikan yang dapat diakses dengan teknologi asistif. Banyak dari mereka yang harus mengandalkan bantuan pribadi atau keluarga besar untuk memastikan anak-anak mereka dapat mengakses pendidikan yang layak. Selain itu, akses terhadap layanan publik dan teknologi komunikasi juga sangat terbatas. Dalam wawancara, beberapa keluarga tunawicara menyebutkan bahwa fasilitas umum seperti rumah sakit, kantor pemerintahan, dan pusat layanan sosial tidak ramah difabel. Kurangnya aplikasi atau layanan berbasis digital yang bisa mengakomodasi kebutuhan tunawicara semakin memperburuk situasi, sehingga menghambat mereka dalam memperoleh informasi atau layanan yang seharusnya dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Sebagai contoh, aplikasi e-government yang digunakan di desa setempat belum menyediakan aksesibilitas untuk tunawicara, sehingga keluarga difabel sering kali kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti kesehatan dan administrasi.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan sosial dan aksesibilitas, keluarga tunawicara di pedesaan menunjukkan ketahanan ekonomi yang cukup signifikan melalui strategi adaptasi. Banyak keluarga yang mengandalkan pekerjaan di sektor informal seperti bertani, berdagang kecil, atau usaha rumahan. Kegiatan ini memungkinkan mereka untuk tetap bertahan meskipun pendapatan yang diperoleh tidak tetap dan terbatas. Sebagai contoh, salah satu keluarga mengelola usaha kerajinan tangan yang dijual di pasar lokal, sementara keluarga lainnya bertani

dengan metode sederhana yang tidak membutuhkan komunikasi verbal yang intensif. Dukungan sosial juga menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan ekonomi mereka. Keluarga besar dan jaringan sosial di sekitar mereka memainkan peran vital dalam memberikan bantuan ketika menghadapi kesulitan ekonomi. Misalnya, dalam situasi darurat, keluarga tunawicara saling membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti bahan pangan atau biaya pengobatan. Dukungan ini memperkuat ketahanan mereka meskipun mereka terbatas dalam akses pekerjaan formal dan fasilitas publik. Strategi adaptasi ini menunjukkan bahwa meskipun terhambat oleh eksklusi sosial dan keterbatasan aksesibilitas, keluarga tunawicara tetap dapat bertahan dan mengupayakan keberlangsungan ekonomi rumah tangga mereka melalui diversifikasi pekerjaan dan saling mendukung dalam komunitas.

Gambar 1.
Diagram alur ketahanan ekonomi keluarga Tunarungu di pedesaan Kabupaten Grobogan



Stigma Masyarakat terhadap Difabel Tunawicara

Stigma sosial terhadap keluarga tunawicara di pedesaan Kabupaten Grobogan merupakan hambatan utama yang memengaruhi partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Stigma ini sering kali muncul dalam bentuk pandangan negatif masyarakat yang menganggap keluarga difabel tunawicara tidak mampu berkontribusi secara aktif, baik dalam pekerjaan maupun kegiatan sosial. Stigma ini menciptakan penghalang sosial yang memperburuk ketahanan sosial keluarga tunawicara, yang pada gilirannya memperlebar kesenjangan ekonomi mereka. Teori Stigma yang dikemukakan oleh Goffman (1963) menjelaskan bahwa stigma sosial timbul ketika individu atau kelompok dipandang tidak sesuai dengan norma atau standar yang diterima oleh masyarakat. Bagi keluarga tunawicara, stigma ini terbentuk dari persepsi bahwa mereka tidak dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat, khususnya dalam hal komunikasi. Masyarakat seringkali menganggap bahwa difabel tunawicara tidak dapat berkontribusi secara produktif dalam pekerjaan formal atau sosial, yang mengakibatkan pengucilan mereka dari peluang ekonomi yang lebih besar. Seorang ibu dari keluarga tunawicara menjelaskan,

"Kami sering merasa dipandang sebelah mata, terutama saat ada acara desa atau kegiatan gotong-royong. Banyak yang berpikir kami tidak bisa memberikan kontribusi karena anak saya tidak bisa berbicara seperti yang lain." (Ibu dari anak tunawicara, Desa Lodan, Grobogan).

Penelitian oleh Andersen et al. (2022) tentang teori stigma struktural menunjukkan bahwa stigma bukan hanya masalah individu, tetapi juga merupakan masalah sosial yang terstruktur dalam masyarakat. Stigma terhadap difabel tunawicara sering kali diperburuk dengan tidak adanya edukasi yang memadai mengenai hak-hak difabel dan potensi mereka dalam berkontribusi. Hal ini tercermin dalam banyak interaksi sosial di pedesaan, di mana keluarga tunawicara sering kali diabaikan atau dipandang sebelah mata dalam kegiatan sosial atau ekonomi. Dalam konteks masyarakat pedesaan, stigma terhadap difabel tunawicara sering kali mengarah pada isolasi sosial yang memperburuk keterbatasan akses mereka terhadap layanan sosial dan peluang pekerjaan. Penelitian oleh Bharti et al. (2024) juga menegaskan bahwa stigma sosial yang melibatkan kelompok difabel tidak hanya membatasi interaksi sosial mereka, tetapi juga membatasi akses mereka ke peluang ekonomi. Penolakan sosial ini memengaruhi persepsi diri difabel tunawicara, menciptakan perasaan rendah diri yang akhirnya memengaruhi motivasi mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Stigma dan eksklusi sosial ini memiliki dampak jangka panjang, yaitu terbatasnya mobilitas sosial dan ekonomi keluarga tunawicara. Sebagai contoh, banyak keluarga yang merasa tidak diterima dalam komunitas mereka, sehingga mereka enggan untuk memperjuangkan hak-hak mereka, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun akses terhadap layanan sosial.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Blanck et al. (2024a) yang menunjukkan bahwa stigma terhadap difabel, termasuk tunawicara, dapat memperburuk kondisi ekonomi mereka dan memperlebar kesenjangan sosial. Selain itu, stigma sosial yang berlarut-larut menyebabkan terbatasnya dukungan sosial yang mereka terima dari masyarakat sekitar. Sebagian besar keluarga tunawicara mengandalkan dukungan dari keluarga besar atau jaringan sosial yang terbatas, yang memengaruhi kemampuan mereka untuk mendapatkan bantuan atau peluang yang lebih luas dalam kehidupan ekonomi. Secara keseluruhan, stigma terhadap difabel tunawicara memperburuk ketahanan sosial dan ekonomi mereka di pedesaan. Tanpa pemahaman yang lebih baik dari masyarakat mengenai kemampuan difabel tunawicara, mereka akan terus menghadapi tantangan besar dalam memperoleh hak mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi stigma melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat sangat penting agar keluarga tunawicara dapat mengakses kesempatan yang setara dengan keluarga non-difabel.

Diskriminasi dalam Kesempatan Kerja

Diskriminasi terhadap keluarga tunawicara, khususnya dalam kesempatan kerja, merupakan salah satu faktor utama yang membatasi kemampuan mereka untuk mencapai kestabilan ekonomi. Masyarakat sering kali menganggap bahwa keluarga tunawicara, karena keterbatasan komunikasi, tidak dapat berfungsi secara efektif dalam pekerjaan formal. Penolakan atau kesulitan dalam memperoleh pekerjaan di sektor formal adalah masalah umum yang dihadapi keluarga difabel tunawicara, terutama di pedesaan. Hal ini menyebabkan banyak anggota keluarga tunawicara beralih ke sektor informal yang tidak menawarkan jaminan sosial atau stabilitas pendapatan yang layak. Seorang kepala keluarga tunawicara berkata,

"Saya pernah melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, namun mereka menolak dengan alasan tidak ada yang bisa berkomunikasi dengan saya. Padahal, saya bisa melakukan pekerjaan yang mereka butuhkan, hanya saja tidak bisa berbicara seperti orang pada umumnya."(Kepala keluarga tunawicara, Desa Blimbing, Grobogan)

Teori Diskriminasi menurut Pang & Park (2003) menyatakan bahwa diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik yang terlihat jelas maupun yang lebih terselubung. Dalam konteks ini, diskriminasi terhadap difabel tunawicara dapat dilihat sebagai bentuk diskriminasi terselubung, di mana kemampuan mereka untuk bekerja diabaikan karena anggapan bahwa mereka tidak dapat berkomunikasi dengan efektif. Ini sering kali mengarah pada pengabaian peluang kerja yang seharusnya dapat diakses oleh mereka, meskipun mereka memiliki keterampilan dan kapasitas untuk bekerja.

Penelitian oleh Mittal et al. (2023) juga menegaskan bahwa difabel tunawicara sering kali dipandang rendah oleh pemberi kerja, yang menganggap mereka tidak dapat berkontribusi secara efektif dalam pekerjaan yang memerlukan komunikasi verbal atau interaksi langsung. Diskriminasi ini diperparah dengan kurangnya pelatihan atau kesadaran dari pihak perusahaan tentang cara memfasilitasi karyawan difabel, yang mengarah pada marginalisasi mereka di tempat kerja. Hal ini menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap difabel tidak hanya terjadi di tingkat individu, tetapi juga dalam sistem struktural yang lebih luas, yang tidak menyediakan dukungan yang cukup untuk membantu mereka beradaptasi di tempat kerja. Lebih lanjut, teori ketimpangan kesempatan (*opportunity inequality*) yang dikemukakan oleh Tomaskovic-Devey et al. (2009) menyatakan bahwa ketidaksetaraan kesempatan kerja sering kali terjadi akibat eksistensi stereotip dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu, termasuk difabel. Dalam kasus ini, stigma terhadap tunawicara memperburuk ketimpangan kesempatan yang mereka alami. Tidak hanya pada aspek pengakuan kemampuan, tetapi juga dalam akses terhadap peluang yang lebih baik. Misalnya, meskipun ada sektor-sektor pekerjaan yang dapat diakses oleh tunawicara, namun mereka tidak memiliki akses yang setara, karena sering kali diabaikan oleh pemberi kerja yang lebih memilih kandidat tanpa keterbatasan komunikasi. Sebagian besar keluarga tunawicara melaporkan bahwa mereka lebih sering diterima di sektor informal yang tidak membutuhkan keterampilan komunikasi verbal yang intens.

Pekerjaan-pekerjaan tersebut, meskipun membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga, sering kali tidak memiliki jaminan sosial dan cenderung bergaji rendah. Seperti yang dijelaskan oleh Paz (2021), pekerja difabel, termasuk tunawicara, lebih sering bekerja di sektor informal yang memanfaatkan keterampilan fisik atau non-verbal, namun dengan imbalan yang tidak setara dengan pekerjaan di sektor formal. Diskriminasi dalam kesempatan kerja ini juga berdampak pada ketahanan ekonomi keluarga. Keterbatasan peluang kerja formal membuat keluarga tunawicara sering kali terjebak dalam pekerjaan yang tidak stabil, yang pada gilirannya menghambat mereka untuk mengakses peningkatan kesejahteraan ekonomi. Penelitian oleh Blanck et al. (2024b) menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap difabel di tempat kerja tidak hanya mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka, tetapi juga memperburuk ketidaksetaraan ekonomi yang mereka alami. Secara keseluruhan, diskriminasi dalam kesempatan kerja memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi yang dialami oleh keluarga tunawicara. Ketidakadilan ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan program-program pemberdayaan yang mendukung difabel tunawicara untuk mengakses peluang kerja yang lebih baik dan setara.

Akses terhadap Pendidikan Inklusif

Akses terhadap pendidikan inklusif bagi keluarga tunawicara di pedesaan Kabupaten Grobogan masih menghadapi berbagai kendala. Pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti tunawicara, untuk memperoleh pendidikan yang layak. Namun, implementasi pendidikan inklusif di daerah pedesaan seringkali tidak maksimal. Banyak sekolah yang tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung siswa tunawicara, seperti tenaga pengajar yang terlatih dalam bahasa isyarat atau alat bantu komunikasi yang sesuai. Hal ini menyebabkan anak-anak tunawicara kesulitan untuk mengikuti pembelajaran dengan efektif. Teori Pendidikan Inklusif yang dikemukakan oleh Ainscow et al. (2006) mengemukakan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya melibatkan penempatan siswa dengan kebutuhan khusus di sekolah umum, tetapi juga mencakup adaptasi kurikulum, pengajaran yang sensitif terhadap kebutuhan individu, serta penyediaan sumber daya yang sesuai. Pendidikan inklusif seharusnya mengutamakan prinsip aksesibilitas, kesetaraan, dan partisipasi aktif bagi semua siswa, termasuk tunawicara. Teori ini menekankan bahwa kesuksesan pendidikan inklusif bergantung pada dukungan penuh dari semua pihak, mulai dari guru, orang tua, hingga komunitas.

Penelitian oleh Akshatha et al. (2024) menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif di banyak sekolah di daerah pedesaan sering kali terkendala oleh kurangnya pelatihan bagi guru dalam menangani siswa tunawicara. Selain itu, Alzahrani (2022) menambahkan bahwa minimnya akses terhadap teknologi assistive, seperti alat bantu pendengaran atau aplikasi komunikasi berbasis teks, menghambat siswa tunawicara dalam memperoleh informasi secara setara. Hal ini berakibat pada rendahnya kualitas pendidikan yang mereka terima, bahkan ketika mereka ditempatkan di sekolah umum yang seharusnya inklusif. Seorang guru di salah satu sekolah pedesaan menyatakan,

"Kami tidak dilatih secara khusus untuk menangani siswa tunawicara. Sumber daya yang ada di sekolah sangat terbatas, jadi saya merasa tidak bisa memberikan perhatian maksimal pada anak-anak dengan kebutuhan khusus." (Guru, Desa Grogol, Grobogan).

Penelitian terbaru oleh Bastiana & Syamsuddin (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif sangat dipengaruhi oleh adanya kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Keterlibatan orang tua dalam mendukung proses belajar anak tunawicara serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif sangat membantu dalam menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan ramah bagi siswa tunawicara. Namun, masih banyak tantangan yang harus diatasi, terutama di pedesaan, di mana sumber daya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang kebutuhan difabel masih terbatas.

Sementara itu, penelitian oleh van den Heuij et al. (2022) menemukan bahwa siswa tunawicara yang mendapat pendidikan inklusif yang berkualitas mengalami peningkatan dalam keterampilan sosial dan akademik mereka. Pendidikan inklusif memberikan mereka kesempatan untuk belajar bersama teman-teman sebaya, yang sangat penting untuk perkembangan keterampilan sosial mereka. Meskipun demikian, Ristić et al. (2021) mengungkapkan bahwa di banyak sekolah pedesaan, kurangnya fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang mendukung anak-anak tunawicara menyebabkan ketertinggalan dalam pencapaian akademik mereka, yang pada gilirannya menghambat kemampuan mereka untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja. Dalam teori aksesibilitas pendidikan, yang dipaparkan oleh

Wolbers et al. (2024) diungkapkan bahwa aksesibilitas pendidikan bukan hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup akses terhadap materi ajar yang dapat diakses oleh semua siswa, baik dari segi bahasa, metode pengajaran, maupun media pembelajaran. Tanpa aksesibilitas yang memadai, anak-anak tunawicara akan terus tertinggal dalam hal pendidikan dan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Secara keseluruhan, meskipun pendidikan inklusif telah menjadi tujuan kebijakan pendidikan nasional, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di daerah pedesaan. Dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan ramah bagi anak-anak tunawicara, agar mereka dapat memperoleh pendidikan yang setara dan berkualitas.

Akses terhadap Layanan Publik dan Teknologi Komunikasi

Akses terhadap layanan publik yang ramah difabel dan teknologi komunikasi yang inklusif menjadi tantangan besar bagi keluarga tunawicara di pedesaan. Di banyak daerah, fasilitas publik seperti rumah sakit, kantor pemerintahan, dan pusat layanan sosial belum cukup ramah bagi tunawicara. Minimnya infrastruktur dan perangkat teknologi yang dapat mendukung mereka dalam mengakses layanan ini menjadi hambatan signifikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Teori Aksesibilitas Sosial menurut Sen (1999) menyatakan bahwa akses terhadap berbagai layanan publik merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan kualitas hidup individu. Aksesibilitas ini bukan hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup kemampuan untuk mengakses informasi dan layanan melalui berbagai kanal, termasuk teknologi. Dalam konteks tunawicara, akses ini sangat bergantung pada adanya teknologi komunikasi yang dapat menjembatani kesenjangan informasi antara mereka dan masyarakat pada umumnya.

Penelitian oleh Evangeline & Moorthy (2024a) mengungkapkan bahwa meskipun teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk mengatasi hambatan komunikasi bagi difabel, banyak layanan publik yang masih belum mengoptimalkan teknologi komunikasi untuk tunawicara. Banyak aplikasi layanan publik atau portal digital yang tidak dilengkapi dengan fitur ramah difabel, seperti teks atau audio yang dapat dipahami oleh tunawicara, atau bahkan penggunaan bahasa isyarat yang sesuai (Roy et al., 2024). Hal ini memperburuk ketimpangan akses terhadap layanan penting, seperti layanan kesehatan, administrasi publik, dan pendidikan. Teori Keadilan Sosial yang dikemukakan oleh Jhon Rawls (1971) menyatakan bahwa setiap individu berhak mendapatkan akses yang setara terhadap layanan publik dan peluang dalam masyarakat, terlepas dari kondisi fisik atau sosial mereka. Dalam konteks ini, teknologi seharusnya berperan sebagai sarana untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memberikan kesempatan yang sama bagi tunawicara untuk mengakses layanan yang mereka butuhkan. Namun, kenyataannya, teknologi seringkali tidak didesain untuk inklusi difabel, sehingga menghalangi mereka untuk memanfaatkan layanan secara maksimal.

Studi oleh Evangeline & Moorthy (2024b) menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam pengembangan aplikasi berbasis teknologi yang mendukung tunawicara, seperti aplikasi terjemahan bahasa isyarat atau pengubah suara menjadi teks, penggunaannya masih terbatas di daerah pedesaan. Di banyak daerah pedesaan, teknologi yang dapat membantu tunawicara masih jarang ditemukan, dan jika ada pun, seringkali tidak terintegrasi dengan sistem layanan publik yang ada. Hal ini menciptakan kesenjangan antara tunawicara

dan masyarakat pada umumnya, yang pada gilirannya memperburuk isolasi sosial dan ekonomi mereka. Salah satu warga tunawicara mengungkapkan,

"Meskipun ada aplikasi yang bisa membantu kami, sering kali aplikasi tersebut tidak diintegrasikan dengan layanan pemerintah yang kami butuhkan, jadi kami tetap kesulitan mengakses informasi atau layanan yang ada." (Warga tunawicara, Desa Kedungwungu, Grobogan).

Lebih lanjut, Weeden (2023) menyatakan bahwa meskipun banyak teknologi baru yang dapat membantu meningkatkan aksesibilitas, tantangan terbesar adalah rendahnya kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya teknologi ini. Dalam banyak kasus, kebijakan pemerintah dan penerapan teknologi komunikasi belum memperhitungkan kebutuhan khusus difabel tunawicara, baik dalam sektor publik maupun swasta. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan peningkatan pemahaman dan komitmen dari pihak berwenang untuk memastikan bahwa layanan publik dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk difabel tunawicara. Infrastruktur digital yang ramah difabel, serta penerapan teknologi assistive dalam sistem layanan publik, perlu dioptimalkan agar semua warga negara dapat mengakses layanan yang setara dan berkualitas. Secara keseluruhan, meskipun teknologi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akses difabel tunawicara terhadap layanan publik, implementasi teknologi yang inklusif masih sangat terbatas, terutama di daerah pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah dan masyarakat untuk mengintegrasikan teknologi ini dalam kebijakan layanan publik yang ramah difabel, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya inklusi digital.

Strategi Nafkah Keluarga Difabel Tunawicara

Keluarga tunawicara di pedesaan Kabupaten Grobogan menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan ketahanan ekonomi mereka. Meskipun mereka sering kali terhalang oleh stigma sosial, diskriminasi dalam kesempatan kerja, serta keterbatasan aksesibilitas, mereka menunjukkan ketahanan ekonomi melalui berbagai strategi adaptasi. Dalam kondisi keterbatasan ini, keluarga tunawicara mengembangkan cara-cara untuk bertahan hidup dan menjaga kesejahteraan ekonomi rumah tangga mereka. Seorang kepala keluarga tunawicara menjelaskan, "Kami sering tidak bisa mengakses pekerjaan formal, jadi kami mencari cara lain untuk bertahan hidup, seperti membuka warung kecil atau membuat kerajinan tangan." (Kepala keluarga tunawicara, Desa Blimbing, Grobogan)

Teori Ketahanan Keluarga yang dikemukakan oleh Walsh (2011) menjelaskan bahwa ketahanan keluarga bergantung pada kemampuan keluarga untuk mengatasi tantangan eksternal dan internal, serta adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Bagi keluarga tunawicara, ketahanan ini sering kali diwujudkan dalam bentuk strategi diversifikasi pekerjaan, di mana mereka mencari atau menciptakan berbagai sumber pendapatan alternatif untuk mengatasi keterbatasan akses kerja formal. Dalam hal ini, keluarga tunawicara tidak hanya mengandalkan satu sumber pendapatan, melainkan memanfaatkan berbagai peluang ekonomi yang tersedia di sekitar mereka.

Penelitian oleh Sheppard-Jones & Lasley-Bibbs (2021) menunjukkan bahwa keluarga difabel, termasuk tunawicara, sering kali terlibat dalam pekerjaan informal yang lebih fleksibel, seperti berdagang kecil, bertani, atau membuka usaha rumahan. Pekerjaan-pekerjaan ini memungkinkan mereka untuk tetap bekerja meskipun mereka memiliki keterbatasan dalam hal

komunikasi atau akses ke pekerjaan formal. Pekerjaan di sektor informal memberi mereka kesempatan untuk tetap berpartisipasi dalam ekonomi lokal meskipun dengan pendapatan yang tidak tetap dan terbatas. Salah satu contoh adalah keluarga tunawicara yang membuka usaha kerajinan tangan atau usaha makanan, yang sering kali memanfaatkan keterampilan non-verbal dan modal sosial mereka. Selain itu, dukungan dari keluarga besar dan jaringan sosial juga memainkan peran penting dalam strategi nafkah keluarga. Dalam banyak kasus, keluarga tunawicara saling membantu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, seperti membantu biaya pendidikan anak-anak atau memberikan bantuan di saat-saat sulit. Penelitian oleh Rakap & Vural-Batik (2024) menunjukkan bahwa dukungan sosial yang kuat dapat meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga difabel, karena mereka tidak hanya mengandalkan pendapatan pribadi, tetapi juga pada kerjasama keluarga dalam menghadapi kesulitan ekonomi.

Studi oleh (Kara et al., 2024) mengungkapkan bahwa kerjasama komunitas juga sangat penting dalam mendukung ketahanan ekonomi keluarga tunawicara. Di beberapa desa, terdapat kelompok-kelompok pendukung yang membantu keluarga difabel dengan berbagi informasi mengenai peluang pekerjaan, akses ke bantuan sosial, serta peningkatan keterampilan. Keluarga tunawicara yang aktif dalam kelompok sosial ini lebih mungkin untuk memperoleh peluang ekonomi yang lebih baik, meskipun dihadapkan pada keterbatasan aksesibilitas dan diskriminasi sosial. Namun, meskipun strategi-strategi ini cukup efektif dalam membantu keluarga tunawicara bertahan, pendapatan yang tidak tetap dan ketidakpastian pekerjaan masih menjadi tantangan besar. Menurut Зудина (2021), pekerjaan di sektor informal meskipun memberikan fleksibilitas, tidak menawarkan jaminan sosial atau akses ke fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pension. Hal ini memperburuk ketidakpastian ekonomi yang mereka hadapi, terutama dalam jangka panjang. Dengan demikian, strategi nafkah keluarga tunawicara yang berhasil bergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan peluang yang ada di sekitar mereka, baik melalui sektor informal maupun dukungan sosial yang diterima dari keluarga dan komunitas. Meskipun strategi ini cukup efektif dalam mengatasi tantangan sehari-hari, dukungan yang lebih besar dari pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan peluang ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi keluarga tunawicara.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi ketahanan ekonomi keluarga tunawicara di pedesaan Kabupaten Grobogan yang menghadapi tantangan eksklusi sosial dan keterbatasan aksesibilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga tunawicara di daerah pedesaan mengalami diskriminasi sosial yang signifikan, yang membatasi partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Diskriminasi ini sering kali muncul dalam bentuk stigma masyarakat yang menganggap keluarga tunawicara tidak mampu berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam pekerjaan formal maupun informal. Meskipun begitu, keluarga tunawicara tetap menunjukkan ketahanan ekonomi melalui strategi adaptasi, seperti beralih ke sektor informal, membuka usaha rumahan, dan mengandalkan dukungan sosial dari keluarga besar serta komunitas.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan publik menjadi faktor penghambat lainnya dalam meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga tunawicara. Banyak anak-anak dari keluarga tunawicara yang kesulitan mengakses

pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, terutama di wilayah pedesaan yang minim fasilitas inklusif. Begitu pula, akses terhadap layanan kesehatan dan administrasi publik yang ramah difabel masih terbatas, yang semakin memperburuk ketimpangan sosial- ekonomi yang mereka alami.

Kontribusi dari penelitian ini sangat penting, baik dalam konteks teori maupun praktik. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai ketahanan ekonomi keluarga difabel, khususnya tunawicara, yang masih jarang dibahas dalam konteks pedesaan. Penelitian ini juga memberikan perspektif baru tentang bagaimana stigma sosial dan keterbatasan aksesibilitas mempengaruhi ketahanan ekonomi difabel tunawicara. Secara praktis, temuan-temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam merancang kebijakan pemberdayaan yang lebih inklusif, serta mendukung penyediaan layanan publik yang ramah difabel. Dalam hal ini, kebijakan yang berfokus pada pengurangan stigma sosial dan peningkatan aksesibilitas bagi difabel tunawicara akan sangat bermanfaat.

Namun, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya jumlah sampel yang terbatas pada 10 keluarga tunawicara di Kabupaten Grobogan. Penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih luas dan di wilayah yang berbeda dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika ketahanan ekonomi keluarga tunawicara di pedesaan. Selain itu, penelitian ini juga belum mengkaji secara mendalam intervensi kebijakan atau program pemberdayaan yang telah diterapkan di daerah lain yang dapat membantu meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga tunawicara.

REFERENSI

- Ainscow, M., Booth, T., & Dyson, A. (2006). "Understanding and developing inclusive practices in schools: A collaborative action research network." Vol. 17(2).
- Akshatha, S., Bhat, M., & Ravi, R. (2024). Attitude and perception of teachers towards inclusion of children with hearing impairment in mainstream schools in Karnataka, India. *Deafness & Education International*, 26(4), 339–358. <https://doi.org/10.1080/14643154.2024.2389592>
- Alzahrani, A. (2022). The Implementation of Assistive Technology with a Deaf Student with Autism. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 21(10), 280–295. <https://doi.org/10.26803/ijlter.21.10.15>
- Andersen, M. M., Varga, S., & Folker, A. P. (2022). On the definition of stigma. *Journal of Evaluation in Clinical Practice*, 28(5), 847–853. <https://doi.org/10.1111/jep.13684>
- Andrunyk, V., Shestakevych, T., & Koshtura, D. (2021). The text analysis software for hearing-impaired persons. 2021 IEEE 16th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), 119–123. <https://doi.org/10.1109/CSIT52700.2021.9648605>
- Bastiana, & Syamsuddin. (2025). Educational collaboration: Different perspectives about regular and special teachers in inclusive school. *Humanities and Social Sciences Letters*, 13(1), 365–378. <https://doi.org/10.18488/73.v13i1.4110>

- Bharti, P., Pandey, J., Verma, S. K., & Singh, T. (2024). Development of Social Stigma Scale in Indian Context. *Psychological Studies*, 69(4), 455–468. <https://doi.org/10.1007/s12646-024-00787-1>
- Blanck, P., Hyseni, F., & Goodman, N. (2024a). Economic Inclusion and Empowerment of People with Disabilities. In *Handbook of Disability* (pp. 1207–1228). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-6056-7_81
- Blanck, P., Hyseni, F., & Goodman, N. (2024b). Economic Inclusion and Empowerment of People with Disabilities. In *Handbook of Disability* (pp. 1207–1228). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-6056-7_81
- ÇETİNKAYA DUMAN, Z., & SARI, A. (2021). Psikiyatri Hemşireliği Alanında Önemli Bir Yapı: Aile Dayanıklılığı. *Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi*, 14(3), 268–276. <https://doi.org/10.46483/deuhfed.755460>
- Evangelina, S. B., & Moorthy, A. D. (2024a). Investigating AI Applications in Communication Tools for Individuals with Speech Impairments: An In-depth Analysis. 2024 IEEE International Conference on Interdisciplinary Approaches in Technology and Management for Social Innovation (IATMSI), 1–6. <https://doi.org/10.1109/IATMSI60426.2024.10502623>
- Evangelina, S. B., & Moorthy, A. D. (2024b). Investigating AI Applications in Communication Tools for Individuals with Speech Impairments: An In-depth Analysis. 2024 IEEE International Conference on Interdisciplinary Approaches in Technology and Management for Social Innovation (IATMSI), 1–6. <https://doi.org/10.1109/IATMSI60426.2024.10502623>
- Goffman, E. (1963). Embarrassment and Social Organization. In *Personality and social systems*. (pp.541–548). John Wiley & Sons, Inc. <https://doi.org/10.1037/11302-050>
- Hay-McCutcheon, M. J., Yuk, M. C., & Yang, X. (2021). Accessibility to Hearing Healthcare in Rural and Urban Populations of Alabama: Perspectives and A Preliminary Roadmap for Addressing Inequalities. *Journal of Community Health*, 46(4), 719–727. <https://doi.org/10.1007/s10900-020-00943-4>
- Huitema, C. M., Knowles, P., Page, P., & Edwards, A. M. (2024). Decentralised Semantics: A Semantic Engine User Perspective. *Data Science Journal*, 23. <https://doi.org/10.5334/dsj-2024-042>
- Jacob, U. S., Pillay, J., Adeoye, O. E., & Oni, T. K. (2023). Barriers to employment of people with intellectual disability. *Work*, 74(1), 207–218. <https://doi.org/10.3233/WOR-211097>
- Jhon Rawls. (1971). *A Theory of Justice* (Original Edition). Cambridge, Massachusetts, London, England: The Belnap Press of Harvard University Press.
- Kara, H. C., Cogen, T., & Telci, F. (2024). Family Resilience in Primary Caregivers of Children Who Are Deaf and Hard of Hearing. *American Journal of Audiology*, 33(3), 705–717. https://doi.org/10.1044/2024_AJA-23-00173

- Kim, H., Hwang, H., Gwak, S., Yoon, J., & Park, K. (2024). Improving communication and promoting social inclusion for hearing-impaired users: Usability evaluation and design recommendations for assistive mobile applications. *PLOS ONE*, 19(7), e0305726. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0305726>
- Li, J., Chen, M., & Liu, J. (2024). Social networks, inclusive finance, and residents' well-being: An empirical study based on CFPS. *Finance Research Letters*, 65, 105514. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105514>
- Miles, M. B. , & Huberman, A. M. (1994). In *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*.
- Mittal, V., Patil, P., Upadhyay, A., Madhwani, K., & Giri, N. (2023). Classification of ISL Using Pose and Object Detection-Based Techniques (pp. 131–144). https://doi.org/10.1007/978-981-99-0838-7_11
- Pang, V. O., & Park, C. D. (2003). Examination of the Self-Regulation Mechanism: Prejudice Reduction in Pre-Service Teachers. *Action in Teacher Education*, 25(3), 1–12. <https://doi.org/10.1080/01626620.2003.10734437>
- Paz, J. A. (2021). Wage gap between segments of the labor market in Argentina. *Desarrollo y Sociedad*, 88, 239–271. <https://doi.org/10.13043/DYS.88.7>
- Rakap, S., & Vural-Batik, M. (2024). Mitigating the impact of family burden on psychological health in parents of children with special needs: Buffering effects of resilience and social support. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 37(1). <https://doi.org/10.1111/jar.13179>
- Reyes, C. M. (2024). Education. In *Poverty Reduction of the Disabled* (pp. 90–110). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003572497-7>
- Ristić, I., Popović, D., & Milovanović, B. (2021). Indicators of the Wider Social Context and Academic Performance of the Deaf and Hard of Hearing Students. *International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE)*, 9(2), 265–274. <https://doi.org/10.23947/2334-8496-2021-9-2-265-274>
- Roy, A., Karim, E., Bin Farukee, M., & Makedon, F. (2024). ChatGPT as an Assistive Technology: Enhancing Human-Computer Interaction for People with Speech Impairments. *Proceedings of the 17th International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments*, 63–66. <https://doi.org/10.1145/3652037.3663956>
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Oxford University Press.
- Sheppard-Jones, K., & Lasley-Bibbs, V. (2021). Public Health, Work, and Disability. In *Public Health Perspectives on Disability* (pp. 321–339). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-0716-0888-3_15
- Tomaskovic-Devey, D., Avent-Holt, D., Zimmer, C., & Harding, S. (2009). The categorical generation of organizational inequality: A comparative test of Tilly's durable inequality. *Research in Social Stratification and Mobility*, 27(3), 128–142. <https://doi.org/10.1016/j.rssm.2009.04.004>

- van den Heuij, K. M. L., Neijenhuis, K., & Coene, M. (2022). Perspectives of D/HH-Students on Mainstream Higher Education: A Qualitative Study. *The Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 27(4), 385–398. <https://doi.org/10.1093/deafed/enac020>
- Walsh, F. (2011). Family resilience: a collaborative approach in response to stressful life challenges. In *Resilience and Mental Health* (pp. 149–161). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511994791.012>
- Weeden, E. (2023). A model of an accessibility curriculum in higher education. *Frontiers in Computer Science*, 5. <https://doi.org/10.3389/fcomp.2023.1139350>
- Wolbers, K. A., Dostal, H. M., Holcomb, L., & Spurgin, K. (2024). Developing expressive language skills of deaf students through specialized writing instruction. *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 29(3), 350–361. <https://doi.org/10.1093/deafed/enad065>
- Зудина, А. А. (2021). Работники старших возрастов в российском неформальном секторе: масштаб, динамика и структура занятости. *Мир России*, 30(2), 72–97. <https://doi.org/10.17323/1811-038X-2021-30-2-72-97>